



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 28 Desember 2020

Halaman: 1

RUSAK KEINDAHAN KOTA: Sampah menggunung di berbagai sudut Kota Jogja saat TPST Piyungan diblokade warga beberapa hari.

Tarif Sesuai Sampah yang Dibuang Warga

Tak Ingin Blokade TPST Piyungan Terulang Lagi

JOGIA, Radar Jogja - Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, memang sudah kembali beroperasi Rabu (23/12) lalu setelah diblokade warga sekitar. Sampah-sampah yang berasal dari Kota Jogja, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Kartamantul) kembali bisa dibuang ke lokasi tersebut.

Namun sampai saat ini tetap timbul pertanyaan mengenai keberlangsungan TPST tersebut. Termasuk soal adakah kemungkinan masalah serupa seperti penutupan oleh warga lantaran TPST telah penuh, seperti yang selama ini sering terjadi akan terulang kembali.

Apalagi produksi sampah masyarakat juga tidak mengalami penurunan. Setiap hari TPST itu harus menerima berton-ton sampah dari Kartamantul.

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM Muhammad Pramono Hadi mengatakan, harus ada terobosan baru soal pengelolaan. ▶ *Baca Tarif... Hal 7*

Tarif Sesuai Sampah yang Dibuang Warga

Sambungan dari hal 1

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Semestinya ada tempat baru untuk membuang sampah, tapi bukan pengelolaan sampah yang ditumpuk seperti di Piyungan.

"Harus ada inovasi, misalnya pembuangan sampah jangan dengan *sanitary land fill* atau ditumpuk lagi," katanya kemarin. Selain itu, Pramono juga menambahkan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga masing-masing. Yang paling sederhana, lanjutnya, adalah soal memisahkan mana sampah organik, anorganik, dan sebagainya. Penting juga dibuat semacam regulasi yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. Regulasi itu kurang lebih isinya mewajibkan masyarakat untuk mengeluarkan uang ketika akan membuang sampah.

Artinya, lanjut Pramono, masyarakat bukan membayar iuran sampah yang diambil petugas kebersihan di rumahnya lalu dibawa ke TPST. Namun biaya yang dikenakan untuk pemusnahan sampah sampai akhir.

"Jadi semakin banyak sampah yang dibuang, semakin mahal tarif yang dibayarkan," usulnya.

Sementara itu, Pemprov DIJ beberapa kali menyatakan sedang mencari investor untuk mengelola sampah di TPST Piyungan. Agar sampah di TPST itu bisa diolah dan tidak hanya didiamkan. Namun, sampai saat ini proses pencarian itu seperti belum menemui titik temu.

"Kami maksimalkan dulu TPST Piyungan saat ini," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) DIJ Hananto Hadi Purnomo. (kur/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005